

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI GULA AREN  
DI DESA TAMBELANG KECAMATAN TOLUUAAN SELATAN KABUPATEN  
MINAHASA TENGGARA**

**BRIAN DEVID TULUNG  
ALDEN LALOMA  
HELLY F. KOLON DAM**

*SUMMARY: Community empowerment actually refers to the word empowerment, which is an effort to actualize the potential that is already owned by the community. Thus, the approach of community empowerment in the development of palm sugar farming communities is the emphasis, on the importance of self-reliant local communities, as a system that organizes themselves. Such community empowerment approach is certainly expected to give a role to individuals not as objects, but as actors who determine their lives. Community empowerment efforts can be seen from the side of their existence as a process. Empowerment as a process can be seen from the stages of activities in order to achieve a goal, which is usually determined by the time period. Society in English terms is society that comes from the Latin word socius which means (friend). The term community comes from the Arabic word syaraka which means (to participate and participate). Society is a group of people who get along with each other, in scientific terms it interacts with each other. A human entity can have infrastructure through which its citizens can interact with one another. Another definition, society is the unity of human life that interacts according to a particular system of customs which is continuous, and which is bound by a sense of shared identity. Continuity is a community unity that has all four characteristics, namely: Interaction between its citizens, customs, continuity of time, a strong sense of identity that binds all citizens. The most important factor that must be considered in carrying out community empowerment programs is that without business capital it is very difficult for the community to be able to improve their standard of living. Empowering people is not enough just to provide venture capital but must be accompanied by an increase in the capacity of human resources so that they are able to think and act in making various efforts and efforts to improve their welfare independently without any dependence on others. Provision of facilities and infrastructure for the community to be able to do their business is one part of the government's responsibility which must be carried out through community empowerment programs.*

*Keywords: Empowerment, Community, Business Capital, Facilities and Infrastructure.*

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia disamping mempunyai tujuan umum untuk memberdayakan masyarakat, pada hakikatnya juga mempunyai tujuan khusus yakni tujuan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang – undang yang mengaturnya, yang umumnya pada visi dan misi tertentu.

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (UU.No. 6/2014).

Pembangunan desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan desa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna menuju kemandirian masyarakat dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur dan untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penduduk pedesaan merupakan bagian terbesar dari pendudukan yang taraf kehidupannya masih rendah. Untuk meningkatkan kehidupan masyarakat tersebut perlu meningkatkan kehidupan masyarakat tersebut perlu peningkatan produktivitas, peningkatan ketrampilan dan teknologi tepat guna. Untuk itu diperlukan adanya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan perhubungan dan lain – lain yang mendorong berkembangnya desa. Pembangunan desa dirasakan demikian luas dan kompleks sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan tetap terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan komponen atau aparat yang dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal

untuk melaksanakan urusan – urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik. Di era reformasi ini dituntut perlu adanya aparatur yang handal, berdedikasi tinggi, memiliki moralitas yang baik, loyalitas terjamin dan mempunyai disiplin kerja yang tinggi.

Dengan kewenangan yang dimilikinya aparatur negara bukan dibentuk untuk melayani dirinya sendiri atau menyelenggarakan kepentingan diri sendiri dengan tugas utama yaitu melayani apa yang menjadi kepentingan masyarakat atau publik (public interest). Kepentingan publik menjadi koridor atas apa yang menjadi aktivitas pemerintahan.

Keberadaan aparatur pemerintah tidak lain sebagai pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan – kebutuhan publik. Aparatur pemerintah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat (1) huruf g, menyebutkan salah satu tugas camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian PP No, 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menjabarkan tugas camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi (1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan, (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah kerja kecamatan, (3) efektivitas

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan (4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati / walikota.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah disinggung di atas, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat salah satu sektor yang dapat diberdayakan berdasarkan potensi yang ada dimasyarakat khususnya di Desa Tambelang Kec. Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu pengelolaan gula aren yang dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat yang hingga saat ini jumlahnya mencapai 25 orang yang rata – rata dari mereka masih tergolong masyarakat atau keluarga kurang mampu / miskin, sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan berkenaan dengan peningkatan ekonomi pedesaan terutama di bidang pertanian maupun dibidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti bantuan modal bagi petani dan usaha kecil, pelatihan usaha ekonomi produktif dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi).

Dari hasil pengamatan yang dilakukan nampaknya terdapat beberapa permasalahan atau kelemahan dalam pelaksanaan program – program atau kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Touluaan Selatan seperti adanya program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran, pelaksanaan program / kegiatan tidak tepat waktu dan kurangnya dukungan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan.

Beberapa permasalahan atau kelemahan dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Touluaan Selatan belum berjalan

efektif bahkan belum menyentuh aspek kepentingan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat terutama mereka yang tergolong ekonomi lemah atau berada dibawah garis kemiskinan. Atas pertimbangan permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian melalui penelitian ilmiah tentang “Pemberdayaan Masyarakat Petani Gula Aren di Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **PENGERTIAN PEMBERDAYAAN**

Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowermen*). Berdasarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kedua, proses ini dapat dilengkapi pula dengan aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marsden, 2004).

Kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan ekonomi yang lebih siap dan lebih maju. Perbedaan dalam hal pemanfaatan ini akan mendorong munculnya perbedaan tingkat produktivitas dan kemajuan. Dalam lingkup yang lebih luas, ketidaksamaan dalam mendapatkan kesempatan akan mengakibatkan timbulnya masalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Dalam menghadapi masalah seperti ini, pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada wilayah, sektor dan golongan ekonomi yang tertinggal. Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah dalam bentuk

program/proyek pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1999).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia Barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata empowerment yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat petani gula aren adalah penekanan, pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (selfreliant communities), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya yang diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moelyarto, 1996 dalam Wahyono, dkk, 2001).

## **PENGERTIAN MASYARAKAT**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata Bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan

kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar warga-warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009:15- 118).

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. (Hasan Shadily 1984:47). Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut Djodjodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkabangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia (Abu Ahmadi 2003:97).

Pendapat lain mengenai masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat menurut Abu Ahmadi (2003):

1. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah tertentu.
3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta

apabila manusia melakukan hubungan. Mac Iver dan Page dalam Soerjono (2006:22) memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

### **PENGERTIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT.**

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Sumodiningrat (1999) seperti yang dikutip oleh Hutomo (2000) adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk mejadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan skuktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah – langkah proses perubahan struktur, meliputi: (a). pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya; (b). penguatan kelembagaan.

(c). penguasaan teknologi; dan (d). pemberdayaan sumber daya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, adalah: (a). pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi. (b). memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekomoni rakyat agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price talker*; (c). Pelayanan pendidikan dan kesehatan; (d). Penguatan industri kecil; (e). Mendorong munculnya wirausaha baru; dan (f). Pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan mencakup: (a). peningkatan akses bantuan modal usaha; (b). peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia; dan (c). peningkatan akses kesarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:l). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang ada. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*. Artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan ditempat

lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

## **FOKUS PENELITIAN**

Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat petani gula aren dengan memusatkan perhatian pada beberapa aspek seperti : Pemberian pendidikan dan pelatihan, akses permodalan dan manajemen usaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peningkatan Akses Bantuan Modal Usaha**

Modal usaha menjadi salah satu faktor penentu bagi para pelaku usaha baik dibidang perdagangan, jasa, property, sampai pada kalangan industri semuanya membutuhkan modal usaha, tanpa modal para pelaku usaha sulit untuk dapat mengembangkan usahanya. Jadi modal adalah salah satu penggerak utama setiap usaha sehingga para pelaku usaha berlomba – lomba untuk mencari cara bagaimana agar mereka bisa mendapatkan akses permodalan. Ada yang melakukannya dengan cara menggandeng pemerintah sebagai mitra kerja agar dapat bantuan modal usaha atau mendapatkan bimbingan teknis terhadap usaha yang mereka lakukan tapi juga ada yang menempuh cara dengan menggandeng para pengusaha sebagai mitra usaha yang akan membantu permodalan.

Tugas – tugas pemerintah yang diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Untuk melaksanakan amanat Undang – Undang Dasar 1945 itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti mengeluarkan berbagai peraturan serta program yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan salah satu program yang hingga kini dilaksanakan adalah program pemberdayaan masyarakat.

Program ini dibuat untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar – benar berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari keterpurukan karena itu pemerintah terus berupaya melakukan berbagai terobosan guna membantu masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan bagi usaha - usaha yang mereka lakukan seperti mengajak para pengusaha untuk menjadi mitra bisnis baik dalam penyediaan modal usaha maupun dalam pembelian hasil produksi masyarakat seperti para petani sekaligus pengusaha gula aren di Desa Tambelang.

Juga pemerintah terus berupaya memfasilitasi masyarakat yang melakukan usaha untuk mendapatkan bantuan permodalan melalui lembaga – lembaga non pemerintah, BUMN, perbankan dan sebagainya yang mempunyai akses kepada pemerintah sehingga masyarakat mendapat kemudahan untuk mengakses permodalan dan dengan demikian masyarakat dapat melakukan usaha guna meningkatkan kesejahteraannya.

### **2. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan**

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan saat ini ialah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu melakukan tugas – tugas pekerjaannya tanpa tergantung kepada orang lain. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia hanya dapat dilakukan jika masyarakat mempunyai kemauan untuk melaksanakannya jadi harus ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk mau mengembangkan dirinya melalui berbagai saluran pendidikan yang ada, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kedua saluran pendidikan ini mempunyai fungsi penting bagi terciptanya masa depan cemerlang. Dengan kata lain melalui kedua saluran pendidikan ini kita dapat merubah pola pikir yang sempit kepada pola

pikir yang lebih luas dan berorientasi kepada bagaimana merancang masa depan yang harus dimulai sekarang yaitu mempersiapkan segenap kekuatan baik fisik maupun mental spiritual yang ditandai dengan meningkatnya ilmu pengetahuan serta penguasaan teknologi.

Berbicara peningkatan pendidikan atau pengetahuan tidaklah cukup apabila hanya belajar teori seperti yang dilakukan pada pendidikan formal tapi juga harus dibarengi dengan praktek seperti yang dilakukan dalam pelatihan. Sehingga jika kedua saluran pendidikan ini dilakukan secara bersama – sama maka akan saling melengkapi. Demikian halnya jika program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hanya mengandalkan ceramah tanpa diikuti dengan pelaksanaannya. Maka itu tidak akan membawa dampak yang signifikan bagi perbaikan taraf hidup masyarakat, padahal tujuan dari dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu agar program pemberdayaan masyarakat ini berhasil maka pemerintah terus mengikut sertakan masyarakat dalam mengikut program pendidikan dan pelatihan agar mereka dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan bertindak dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan bagi masa depan mereka sendiri.

### 3. Peningkatan Prasarana Pendukung Usaha

Penyediaan prasarana pendukung usaha wajib dilakukan pemerintah sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat karena memang banyak masyarakat yang mau melakukan usaha tapi terkendala karena tidak tersedia prasarana bagi mereka seperti pasar, kios, ruko, kebanyakan hanya dikuasai oleh mereka yang mempunyai modal besar hingga masyarakat tidak mendapatkan tempat untuk berjualan dan keluhan seperti ini sudah sering terdengar bahkan pemerintah berpura-pura tidak tahu atau tidak mau peduli dengan

keadaan masyarakat sehingga tidak ada upaya atau langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut padahal masyarakat sangat membutuhkan keberpihakan pemerintah untuk melindungi mereka dari keterpurukan. Karena masalah ekonomi, kini mereka hanya bisa berharap agar pemerintah dapat memikirkan masa depan mereka serta melakukan upaya – upaya memperjuangkan hak – hak mereka sebagai warga negara warga masyarakat yang terpinggirkan karena tidak berdayanya.

Program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan melindungi masyarakat kurang mampu kiranya dapat dijadikan sarana oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melakukan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

## KESIMPULAN

1. Pemberian bantuan modal usaha adalah salah satu faktor terpenting dan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat karena tanpa adanya modal usaha maka sangat sulit bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjadi pendamping sekaligus sebagai fasilitator bagi masyarakat agar mereka bisa mendapatkan akses bantuan permodalan guna menunjang usaha – usaha yang mereka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh para petani sekaligus pelaku usaha yang memproduksi gula aren di Desa Tambelang.
2. Memberdayakan masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan modal usaha tapi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya sehingga mereka mampu berfikir serta bertindak dalam melakukan berbagai

upaya serta usaha guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri tanpa ada ketergantungan dengan orang lain. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan informal seperti mengikuti kursus ketrampilan, pelatihan – pelatihan serta praktek – praktek lainnya yang membawa dampak pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia itu sendiri.

3. Penyediaan sarana dan prasarana bagia masyarakat untuk dapat melakukan usaha mereka adalah salah satu bagian dari tanggungjawab pemerintah yang harus dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat. Sayangnya hingga saat ini pemerintah belum melakukannya bahkan terkesan terjadi pembiaran kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka tidak mendapatkan fasilitas usaha yang sudah disediakan pemerintah karena telah dikuasai oleh pelaku usaha yang mempunyai modal. Untuk itu melalui program pemberdayaan masyarakat ini pemerintah harus mengambil langkah melindungi masyarakat dari keterpurukan karena masalah ekonomi dengan memperjuangkan hak – hak mereka untuk dapat mempergunakan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk melakukan usaha.

## **SARAN**

1. Untuk dapat memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi diharapkan pemerintah menjadi fasilitator yang berfungsi menjembatani kepentingan masyarakat dengan para pelaku usaha, BUMN, atau lembaga permodalan lainnya sehingga masyarakat dapat mengakses bantuan modal usaha yang akan digunakan bagi

peningkatan usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

2. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, diharapkan pemerintah terus mendorong masyarakat terutama bagi para pelaku usaha agar mereka terus berupaya meningkatkan kemampuan baik melalui pendidikan formal (di sekolah) ataupun melalui pendidikan non formal (diluar sekolah). Seperti mengikuti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Sehingga dengan berbekal pendidikan tersebut masyarakat mampu mengembangkan usahanya, maupun bekerja dan mampu merancang masa depan mereka yang lebih baik secara mandiri tanpa ada ketergantungan dengan orang lain.
3. Untuk dapat menciptakan keseimbangan antara yang kuat dan lemah atau yang kaya dan yang miskin, maka disarankan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan masyarakat kecil ekonomi lemah untuk memperjuangkan hak – hak mereka mendapatkan saran dan prasarana yang disediakan pemerintah yaitu fasilitas tempat mereka melakukan usaha karena selama ini mereka tidak merasa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah sehingga fasilitas yang ada hanya menjadi milik orang – orang yang hanya modal besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasan, Engking Soewarman. 2002. *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*. Bandung: Pustaka Rosda Karya.
- Hutomo Mardi Yatuso, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonom*,



- Tinjauan Teoritik dan Implementasi.*  
Yogyakarta.
- Moeljarto da Sonia. *Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembangunan Sosial Dalam Analisis CSIS Tahun XXVI No. 1.* Januari – Februari 1997.
- Oakley, Peter dan David Marsden. 2004. *Aproaches to Pasrticipation in Rural Development.* Geneva. Ilo.
- Sumodiningrat G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soerjono Soeharto.2006. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta Raja Grapindo Persada.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods).* Bandung Alfabeta.